

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan utama pada rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai Komunikasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2017, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan aspek berikut:

1. Berdasarkan indikator bentuk komunikasi yang terdapat dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul komunikasi internal sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan yaitu baik komunikasi internal dari atas ke bawah yang dilakukan dengan adanya rapat koordinasi antar Dinas atau Instansi Sosial yang terkait dalam PKH di wilayah Provinsi DIY, evaluasi bersama peserta PKH dan komunikasi dari bawah ke atas dilakukan dengan adanya koordinasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai pelaksana PKH dengan Pendamping dan Operator untuk melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali setelah penyaluran bantuan PKH.
2. Berdasarkan indikator proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan proses yang ada yaitu mulai dari komunikator, pesan, saluran, komunikan, umpan balik (*feedback*) serta hambatan dalam proses penyampaian pesan. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial

Kabupaten Bantul sebagai pelaksana PKH atau komunikator PKH Kabupaten Bantul telah melaksanakan sesuai dengan tugas sebagai mana tugas komunikator yaitu melakukan koordinasi dengan pihak bawahan yaitu Pendamping dan Operator. Pendamping sebagai agen yang membantu komunikasi atau penerima pesan, sehingga pesan atau informasi dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat atau KPM dalam pertemuan kelompok. Saluran atau media yang digunakan dalam pelaksanaan PKH menggunakan Buku Pedoman Pelaksanaan PKH sesuai dengan amanat dari Kementerian Sosial serta saluran dalam penyaluran bantuan kepada KPM juga telah sesuai dengan ketentuan. Umpan balik (*feedback*) yang diberikan oleh KPM sesuai dengan yang diharapkan yaitu tercantum dalam tujuan PKH. Masyarakat terbantu selain dengan bantuan PKH juga dengan program komplementer penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

3. Berdasarkan indikator hambatan dalam komunikasi pemerintah pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul terdapat dua hambatan antara komunikator dan komunikan dalam proses menyampaikan pesan. Hambatan yang terlihat jelas dalam pelaksanaan PKH disebabkan karena perbedaan status sehingga akan mempengaruhi pesan yang disampaikan komunikator untuk diteruskan kepada

komunikasikan. Pembatasan menjadi hambatan dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul dikarenakan tidak ada *open system* oleh pihak Kementerian Sosial untuk mengusulkan kepesertaan PKH oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Tekanan-tekanan tidak menjadi hambatan karena dapat diatasi oleh pemerintah Kabupaten Bantul terutama oleh tim pelaksana PKH karena dengan adanya grup aplikasi WhatsApp mempermudah untuk koordinasi apabila terjadi hal yang mendesak. Jarak geografis tidak lagi menjadi hambatan dikarenakan dapat diatasi dengan adanya Bis Layanan Gerak (BLG), penggunaan bahasa yang dapat diatasi karena sebagian besar Pendamping PKH berdomisili di Provinsi DIY sehingga dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa daerah kepada KPM. Sehingga sampainya pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh Pendamping serta hambatan pada saat pertemuan kelompok yaitu penggunaan bahasa dapat diatasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil peneilitan dan kesimpulan sehingga peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penentuan kepesertaan PKH diharapkan Kementerian Sosial melakukan *open system* sehingga diharapkan dapat melibatkan UPPKH Kabupaten, PPKH Kecamatan dikarenakan dalam pelaksanaan PKH Pendamping sebagai agen yang secara langsung berinteraksi dan turun ke masyarakat.
2. Kementerian Sosial diharapkan dapat memberikan inovasi keberlanjutan kepesertaan PKH dikarenakan masa kepesertaan hanya 6 tahun meskipun PKH termasuk program jangka panjang namun tidak bersifat permanen.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian berkaitan dengan komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul secara lebih detail.